

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu lingkup dari keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disamping barang-barang inventaris kekayaan negara dan badan usaha milik negara (BUMN). Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara. Oleh karenanya, keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Dipihak lain, pada tingkat pemerintah daerah terdapat pula ruang lingkup yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baik APBD maupun barang-barang inventaris kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah.

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang harus disajikan secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab, maka sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar perundang-undangan yang berlaku.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Belanja didefinisikan yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Belanja sangat penting untuk kelancaran kegiatan dari masing – masing instansi/pihak terkait dalam menjalankan fungsinya.

Akuntansi Belanja merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari satu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi sehingga perlu diketahui bagaimana sistem dan manajemen akuntansi dalam mengelola dan mengendalikan anggaran maupun realisasi belanja. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntansi belanja juga dapat di kembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Untuk menghindari penyelewengan dalam kegiatan belanja, pemerintah membuat peraturan yang mengatur sistem yang harus dipatuhi oleh wilayah kerja.

Prosedur akuntansi belanja adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang melibatkan beberapa orang dalam untuk dapat menjamin suatu aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif yang terutama bersifat keuangan dari satu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan semua penurunan dalam aset bersih dana untuk operasi lancar, belanja modal, atau pelunasan hutang.

Prosedur akuntansi belanja bertujuan untuk mendapatkan data atau catatan yang akurat tentang belanja yang sesuai dengan masing masing dinas kerja serta mendukung dalam pembuatan keputusan personel yang mengendalikan fungsi kas. Prosedur akuntansi belanja sangat penting dilakukan karena melibatkan beberapa pihak untuk menjamin suatu aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif yang terutama bersifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan semua penurunan dalam aset bersih dana untuk operasi lancar, belanja modal dan pelunasan hutang dalam suatu instansi terkait.

Dalam hal ini apabila prosedur akuntansi belanja ini tidak dijalankan dengan sebaik mungkin serta tidak mengikuti sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku, maka akan terjadi ketidaklancaran, dan terganggunya seluruh kegiatan yang berjalan dan yang akan terencana. Sehingga belanja yang terjadi tidak diakui/disahkan, serta mengakibatkan surat pertanggungjawaban atas belanja yang dilakukan tidak diakui/disahkan, Maka prosedur akuntansi belanja ini sangat penting dilakukan dengan cara menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang diberlakukan pada suatu instansi seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), sehingga dalam pencatatan serta pengakuan belanja tidak terjadinya kesalahan dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut dapat diakui serta dipertanggungjawabkan oleh pihak – pihak yang terkait. pemerintah membuat peraturan yang mengatur sistem dan prosedur yang harus dipatuhi oleh wilayah kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi bertanggungjawab kepada Walikota Kota Bukittinggi.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai satu-satunya Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), DPKAD memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang tidak ringan. DPKAD berfungsi sebagai konsolidator di bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, aset dan akuntansi.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, penulisan tertarik untuk membahas tentang Prosedur Akuntansi Belanja, Oleh karena itu penulis berkeinginan membahas lebih lanjut mengenai **“PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA BUKITTINGGI”**.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan ketetapan judul diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Akuntansi Belanja Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Bukittinggi?
2. Apa bukti-bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Belanja?

### 1.3 TUJUAN PENULISAN

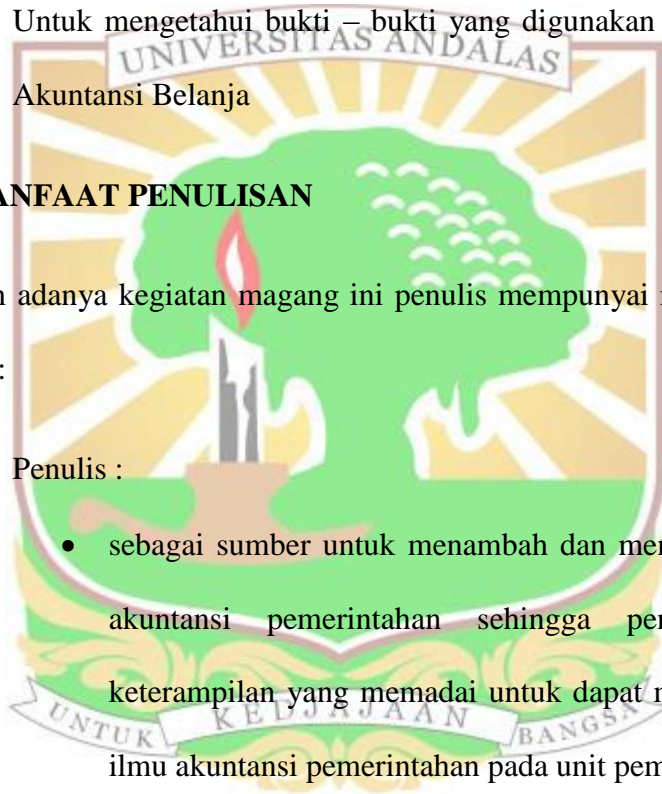
Dengan adanya kegiatan magang ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Akuntansi belanja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bukti – bukti yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Belanja

### 1.4 MANFAAT PENULISAN

Dengan adanya kegiatan magang ini penulis mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Penulis :
  - sebagai sumber untuk menambah dan meningkatkan ilmu akuntansi pemerintahan sehingga penulis memiliki keterampilan yang memadai untuk dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi pemerintahan pada unit pemerintahan
  - menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja
  - dapat menjadi bandingan antara teori dan praktek dalam prosedur belanja



## 2. Instansi:

### ➤ Bagi Program Diploma III FE-UA

- Sebagai bahan masukan untuk pengembangan bahan ajar serta kurikulum khususnya pada akuntansi pemerintahan
- Menciptakan lulusan universitas yang profesional dibidangnya

### ➤ Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi

- Sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi prosedur akuntansi belanja dimasa yang akan datang
- Sebagai bahan pertimbangan menilai pendapatan dan belanja daerah dimasa yang akan datang

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tugas akhir ini akan ditulis beberapa Bab sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan tugas akhir

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini berisi tentang penjelasan prosedur, akuntansi, belanja, prosedur akuntansi, prosedur akuntansi belanja, sistem akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi

### BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini menjelaskan tentang sejarah terbentuk instansi, dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi, rencana strategis instansi

### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang prosedur belanja, prosedur akuntansi belanja pada DPKAD Kota Bukittinggi

### BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran

